

## Hubungan *Vertical Fiscal Imbalance* dan *Local Taxing Power* di Indonesia: Perbandingan Daerah Induk vs Daerah Otonom Baru, 2010 - 2020

<sup>1</sup> Rio Sumalauda, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Indonesia

<sup>2</sup> Diah Widyawati, Universitas Indonesia, Indonesia

<sup>3</sup> Jahen Fachrul Rezki, Universitas Indonesia, Indonesia

---

### Informasi Naskah

Submitted: 22 Juli 2022;

Revision: 09 November 2022;

Accepted: 16 November 2022;

---

### Kata Kunci:

*Vertical Fiscal Imbalance*,  
*Local Taxing Power*,  
Daerah Induk,  
Daerah Otonom Baru

---

---

### Abstract

*This study aims to answer the question of what relationship exists between vertical fiscal imbalance and local taxing power? Will local taxing power rise if the vertical fiscal imbalance declines? or vice versa. Then how big is the magnitude of this change in the vertical fiscal imbalance to local taxing power at the district and city levels, both as parent regions and new autonomous regions. By using the fixed effect model, the results of the study show that 1) an increase in the value of vertical fiscal imbalance by 0.01, which means a decrease in the level of dependence on central transfers, causes an increase in local taxing power; 2) in the parent region, the effect of vertical fiscal imbalance on local taxing power at the district level has an impact of 2.7 times greater than the city level; 3) on the other hand, in new autonomous regions, the effect is greater at the city level, which is 0.45 times compared to the district level; 4) When dependence on central government transfers decreases, both district and cities in new autonomous regions tend to perform better than regencies/cities in the parent region.*

---

---

### Abstrak

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara *vertical fiscal imbalance* dan *local taxing power*? Apakah ketika *vertical fiscal imbalance* mengalami penurunan akan menyebabkan *local taxing power* mengalami kenaikan? atau sebaliknya. Kemudian seberapa besar *magnitude* dari perubahan *vertical fiscal imbalance* ini terhadap *local taxing power* di level kabupaten dan kota, baik yang merupakan daerah induk maupun daerah otonom baru. Dengan menggunakan model *fixed effect*, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peningkatan nilai *vertical fiscal imbalance* sebesar 0,01 yang artinya penurunan tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat, menyebabkan meningkatnya *local taxing power*; 2) pada daerah induk, pengaruh *vertical fiscal imbalance* terhadap *local taxing power* di level kabupaten berdampak 2,7 kali lebih besar dibandingkan level kota; 3) sebaliknya pada daerah otonom baru, pengaruhnya lebih besar pada level kota yakni sebesar 0,45 kali dibandingkan level kabupaten; 4) Ketika ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang, baik kabupaten maupun kota di daerah otonom baru cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di daerah induk.

---

---

\* Corresponding Author.

Rio Sumalauda, [rio.sumalauda@bpkp.go.id](mailto:rio.sumalauda@bpkp.go.id)

DOI: [doi.org/10.23960/jep.v11i3.589](https://doi.org/10.23960/jep.v11i3.589)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan pembentukan daerah otonom baru (DOB) paling tinggi di dunia. Sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yakni pada tahun 1999 sampai dengan diberlakukannya moratorium pemekaran daerah pada tahun 2014, terjadi penambahan jumlah kabupaten dari sebelumnya sebanyak 268 kabupaten menjadi 415 kabupaten (meningkat sebanyak 54,85%), dan level kota dari 68 kota menjadi 93 kota (meningkat sebanyak 36,76%).

Pemekaran daerah merupakan salah satu pilihan kebijakan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam perspektif ekonomi, pemekaran daerah merupakan implementasi konsep *increased proximity* yang dikemukakan oleh Oates (1999). Semakin dekat jarak fisik antara pemerintah daerah dan masyarakat maka akan semakin efisien dan optimal bagi pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Kedekatan secara fisik memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah terkait dengan kebutuhan layanan publik yang dibutuhkan, kemudian pemerintah daerah merespon kebutuhan tersebut sebagai dorongan dalam menyediakan layanan publik secara akuntabel (Martínez-Vázquez et al., 2017)

Beberapa studi telah dilakukan dalam rangka mengevaluasi kebijakan pemekaran daerah yang telah berlangsung. Studi paling awal yakni oleh Bappenas bersama dengan UNDP (2008) dengan metode perbandingan antara daerah otonom baru dan daerah induk, menemukan bahwa sepanjang tahun 2000 – 2005, daerah otonom baru yang terbentuk kondisi ekonomi dan keuangannya tidak lebih baik dibandingkan dengan daerah induknya. Diuraikan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah otonom baru yakni, pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, beban penduduk miskin yang lebih tinggi ditanggung oleh daerah otonom baru, serta kinerja pemerintahan yang kurang optimal karena ketergantungan fiskal yang lebih besar pada daerah otonom baru.

Evaluasi secara resmi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan Decentralization Support Facility (DSF) pada tahun 2011 melalui *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran*. Ruang lingkup evaluasi yang dilakukan adalah kinerja seluruh daerah otonom baru hasil pemekaran sejak tahun 1999 sampai dengan 2009. Evaluasi dilakukan dengan mengukur empat faktor, yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, daya saing daerah, dan tata pemerintahan yang baik, yang kemudian diturunkan ke dalam 14 variabel dan 31 indikator penilaian. Kesimpulan umum evaluasi adalah sebagian besar daerah otonom baru belum menunjukkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Pembentukan daerah otonom baru pada masa awal terbentuknya masih disibukkan dalam urusan penataan infrastruktur pemerintahan dan personil, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Lewis (2017) melakukan studi untuk menjawab pertanyaan apakah pemekaran daerah yang telah berlangsung mampu meningkatkan pelayanan publik, dalam hal ini akses terhadap pendidikan dan sanitasi pada daerah tersebut. Hasil studi menyimpulkan bahwa ternyata daerah hasil pemekaran tidak lebih baik namun juga tidak lebih buruk kinerjanya dibandingkan dengan daerah induknya meskipun daerah pemekaran memiliki *comparative disadvantage* dalam akses pendidikan dan sanitasi. Implikasi dari penelitian ini adalah memekarkan daerah justru merupakan hal yang kontraproduktif. Sepanjang masih terdapat motif mencari keuntungan (*political rent-seeking*) dalam pemekaran daerah maka tidak ada progres yang berarti dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemekaran daerah mempengaruhi porsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah. DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan merupakan dana yang paling diandalkan oleh pemerintah daerah. Keberadaan daerah otonom baru dan daerah induk yang tersisa akan mempengaruhi alokasi DAU. Mengutip Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

Kementerian Keuangan (2011: hal. 140) daerah otonom baru menyerap dana lebih banyak dari alokasi DAU yang tersedia, jika dibandingkan dengan pemerintah daerah lain pada tahun kedua setelah pemekaran. Prasojo (2011) menyebutkan bahwa permasalahan utama dengan terbentuknya daerah otonom baru adalah akan mempersempit kapasitas fiskal pemerintah pusat. Semakin banyak daerah pemekaran maka setiap tahun jumlah transfer pusat ke daerah semakin tinggi, hal ini menyebabkan jumlah belanja negara setiap tahun semakin meningkat.

Di sisi lain, dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah pada prinsipnya diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus 'rumah tangganya' sendiri. Penyerahan kewenangan ini diikuti pula dengan penyerahan sumber – sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah nantinya akan dimanifestasikan melalui struktur pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).

Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola dan mengumpulkan pendapatan asli daerah masih sangat terbatas. Khoirunurrofik (2020) menunjukkan rendahnya *local taxing power*, khususnya pada level kabupaten/kota dalam menggali dan mengoptimalkan potensi sumber penerimaan berupa pajak daerah dan retribusi daerah guna membiayai pengeluaran publiknya. *Local taxing power* dapat didefinisikan sebagai rasio pajak daerah ditambah retribusi daerah terhadap PDRB. Berdasarkan data 10 tahun terakhir (2010 s.d. 2020) secara rata – rata *local taxing power* di level kabupaten dan kota adalah sebesar 0,37% dan 0,63%. Rendahnya *local taxing power* di level kabupaten/kota, membuktikan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan (*revenue assignment*) tidak berjalan dengan baik. Dikutip dari Mahi dan Supriyanti (2019), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dianggap kurang efektif bila belanja pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi inilah yang sampai saat ini masih terjadi pada level kabupaten/kota di Indonesia.

Ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap Dana Perimbangan mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat *vertical fiscal imbalance* (Boadway & Dougherty, 2018). Ketimpangan fiskal vertikal (VFI) umumnya eksis di negara yang menerapkan sistem desentralisasi dimana terjadi ketika pengeluaran pemerintah daerah tidak mampu sepenuhnya dibiayai dari pendapatan asli daerah tersebut atau terjadi *mismatch* antara penerimaan dan pengeluaran yang akan berakibat buruk bagi performa keuangan daerah apabila pemerintah pusat tidak ikut terlibat dalam membiayai pengeluaran daerah.

Beragam penelitian terkait isu pemekaran daerah dalam kerangka ekonomi umumnya fokus membahas aspek pengeluaran publik (*expenditure assignment*) dan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik. Penelitian yang akan dilakukan ini berupaya untuk mengisi *gap* penelitian sebelumnya, yakni melihat isu pemekaran daerah dari sisi penerimaan (*revenue assignment*). Konkritnya akan berfokus pada hubungan antara *vertical fiscal imbalance* dan sisi penerimaan daerah yang direpresentasikan dengan *local taxing power*. Dengan mengaitkan ketiga isu yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, penelitian ini berusaha memberikan bukti empiris serta melakukan perbandingan di masing – masing kabupaten/kota, baik yang merupakan daerah induk maupun daerah otonom baru tentang bagaimana pengaruh *vertical fiscal imbalance* yang terjadi terhadap *local taxing power*. Berdasarkan referensi yang telah penulis peroleh, belum ada penelitian pada level kabupaten/kota di Indonesia yang menjadikan *vertical fiscal imbalance* sebagai variabel *interest* dalam hubungannya dengan *local taxing power*.

Penelitian terkait penerimaan pajak daerah, atau terminologi sejenis seperti *local tax effort*, *tax capacity* atau *local taxing power* pada dasarnya membahas kemampuan suatu daerah dalam mengumpulkan pajak/retribusi yang menjadi kewenangannya dikaitkan dengan beberapa variabel lainnya. Beberapa studi telah dilakukan diantaranya oleh Lewis (2018) dan Lewis (2019) yang meneliti hubungan antara penerimaan pajak daerah terhadap perekonomian. Spesifik

terkait hubungan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi, beberapa penelitian memberikan hasil yang tidak seragam. Benos (2009) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu penelitian yang menyimpulkan adanya hubungan positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Chang (2017) dan Serrato & Zidar (2018). Selain itu terdapat penelitian yang membuktikan bahwa terdapat hubungan bersifat *inverted U-shape* antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi (Loganathan et al., 2017).

Dalam lingkup studi Indonesia, Saragih (2018) menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah pada level provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing – masing provinsi selama periode 2013 – 2016. Untuk konteks lokal, beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda, yakni Age Wibisono & Aisyah (2020) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2014 – 2016, sementara Savitri & Suarjaya (2020) menyimpulkan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama tahun 2014 – 2018.

Studi pada kasus level kabupaten/kota di Indonesia yang mencoba mengaitkan hubungan transfer pusat terhadap pemungutan pajak daerah (*tax effort*) secara komprehensif telah dilakukan oleh Kuncoro (2004) dan Nikijulw (2012). Dengan menggunakan data panel selama periode 1988 – 2002, Kuncoro (2004) menyimpulkan bahwa *conditional grant* (Dana Alokasi Khusus) yang diterima oleh daerah secara signifikan dapat meningkatkan perolehan PAD riil per kapita rata – rata sebesar 0,23%, dan ditemukan pula bahwa ketika *unconditional grant* (Dana Alokasi Umum) diprediksi akan mengalami penurunan, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan PAD sebagai sumber dana pengganti bagi pembiayaan pengeluaran daerah. Sementara itu, dengan menggunakan regresi data panel selama periode 2005 – 2008, Nikijulw (2012) memberikan bukti empiris bahwa transfer pemerintah pusat memiliki hubungan yang positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah (*tax effort*).

Sementara itu penelitian yang mengaitkan permasalahan *vertical fiscal imbalance* terhadap performa fiskal daerah lebih banyak berfokus pada aspek pengeluaran atau belanja daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Jia et al. (2014) yang memberikan bukti empiris bahwa *vertical fiscal imbalance* yang tinggi cenderung menyebabkan terjadinya *overspending* dalam belanja daerah.

Penelitian ini secara substansi memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kuncoro (2004) dan Nikijulw (2012) yakni mencoba untuk melihat pengaruh dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap upaya pemungutan pajak daerah/retribusi daerah (*local taxing power*). Meskipun bukan merupakan isu yang baru, sampai dengan saat ini belum ada konsensus yang baku tentang bagaimana sebenarnya arah respon upaya pemungutan pajak daerah/retribusi daerah (*local taxing power*) sebagai akibat dari dana transfer pusat.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memandang pengaruh dana transfer pusat tersebut. Jika Kuncoro (2004) dan Nikijulw (2012) menjadikan dana transfer pusat yang secara umum terdiri atas: (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel *interest* yang terpisah, maka penelitian ini mencoba untuk mengintegrasikan jenis – jenis transfer pusat tersebut berikut belanja daerah dan pinjaman daerah ke dalam suatu konsep yakni *vertical fiscal imbalance*. Dengan kata lain, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh ketergantungan fiskal yang dialami daerah terhadap kemampuan dalam mengumpulkan pajak daerah/retribusi daerah (*local taxing power*).

Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan pengaruh *vertical fiscal imbalance* terhadap *local taxing power* di kabupaten/kota pada daerah induk maupun daerah otonom baru dalam ruang lingkup berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 yakni sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2020. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan yang cukup

mendasar diantara keduanya (daerah induk vs daerah otonom baru) utamanya dilihat dari aspek kelembagaan, yakni kapasitas eksekutif–legislatif dalam merumuskan kebijakan terkait pajak daerah/retribusi daerah, dan kapasitas aparat daerah serta infrastruktur yang dimiliki dalam pengumpulan pajak daerah/retribusi daerah. Daerah induk cenderung memiliki organisasi dan pengalaman yang lebih matang dibandingkan daerah otonom baru dalam mengumpulkan pajak daerah/retribusi daerah (Pambudhi, 2021: hal. 82 dan Jaweng, 2022: hal. 217-219).

## METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPS. Variabel *Local Taxing Power* sebagai variabel dependen dalam penelitian ini merupakan hasil pengolahan dari data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan dari data PDRB Riil yang bersumber dari BPS. Variabel *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI) sebagai variabel *interest* merupakan hasil pengolahan dari data realisasi keuangan daerah kabupaten/kota yakni Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Total Belanja Daerah yang diperoleh dari Kementerian Keuangan.

Variabel independen berikutnya yang merupakan hasil pengolahan dari data yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan BPS yakni variabel Rasio Surplus (Defisit) APBD terhadap PDRB Riil Tahun Sebelumnya. Variabel independen selanjutnya yang diperoleh dari BPS lalu diolah kembali yakni *growth* PDRB per kapita, Inflasi (PDRB Deflator), dan (*ln*) Kepadatan Penduduk.

Karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Unit analisis (*cross section*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 508 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Dalam hal ini tidak termasuk 5 kota dan 1 kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta, karena keenam daerah tersebut tidak dikategorikan sebagai daerah otonom dan kewenangannya dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah berbeda dengan daerah kabupaten/kota lainnya.

Periode waktu (*time series*) yang dipakai pada penelitian ini adalah dari tahun 2010 sampai dengan 2020, dengan pertimbangan utama bahwa pada kurun waktu tersebut adalah masa efektif berlakunya ketentuan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebelum dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tujuan utama dari penelitian ini yang mencoba untuk membandingkan berapa besar magnitude dari perubahan *Vertical Fiscal Imbalance* terhadap *Local Taxing Power* di level kabupaten dan kota, baik yang merupakan daerah induk maupun daerah otonom baru, maka unit analisis yang dipakai dalam penelitian ini yakni 508 kabupaten/kota kemudian akan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu masing – masing kabupaten dan kota yang ada pada Daerah Induk dan Daerah Otonom Baru. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa dari 508 kabupaten/kota terdapat 336 kabupaten/kota yang merupakan daerah induk dan 172 kabupaten/kota yang menjadi daerah otonom baru sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2014.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *Local Taxing Power* yang merupakan rasio pajak daerah ditambah retribusi daerah terhadap PDRB. Dengan rumusan sebagai berikut:

$$Local\ Taxing\ Power = \frac{Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah}{PDRB\ Riil}$$

Variabel interest dalam penelitian ini adalah *vertical fiscal imbalance*. Variabel independen lain yang digunakan sebagai kontrol yakni *growth* PDRB per kapita, inflasi, rasio surplus (defisit) APBD terhadap PDRB, dan *ln* kepadatan penduduk.

### **Vertical Fiscal Imbalance**

Formula penghitungan *vertical fiscal imbalance* yang relevan digunakan di Indonesia, yakni menyesuaikan dengan penyajian dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Shah et al., (1994; hal. 53), yakni

$$VFI_{it} = 1 - \left[ \left( \frac{\text{Dana Perimbangan}_{it} + \text{Pinjaman Daerah}_{it}}{\text{Belanja Daerah}_{it}} \right) \right]$$

Berdasarkan formula tersebut, nilai VFI akan berada pada rentang angka 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati nilai 0 maka *vertical fiscal imbalance* yang terjadi di suatu daerah semakin tinggi yang artinya daerah tersebut sangat bergantung pada transfer pusat, dan sebaliknya nilai VFI mendekati 1 maka *vertical fiscal imbalance* suatu daerah semakin rendah atau dengan kata lain keuangan daerah tersebut telah cukup mandiri untuk membiayai pengeluarannya.

Dari rumusan di atas, untuk kasus Indonesia, naik turunnya besaran koefisien VFI ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar Dana Perimbangan yang diterima dan Belanja Daerah yang dikeluarkan. Jika diasumsikan belanja daerah tidak mengalami perubahan dan pinjaman daerah tidak cukup signifikan, maka naik turunnya koefisien VFI akan dipengaruhi oleh seberapa besar Dana Perimbangan yang diterima oleh suatu daerah. Semakin rendah Dana Perimbangan yang diterima dibandingkan periode sebelumnya maka nilai VFI akan mengalami peningkatan atau ketergantungan daerah akan berkurang, hal sebaliknya jika Dana Perimbangan meningkat maka nilai VFI akan menurun atau terjadi peningkatan ketergantungan daerah terhadap pusat.

Jika diasumsikan bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah tidak mengalami perubahan (tetap) selama beberapa tahun, maka faktor utama yang akan menyebabkan naik turunnya nilai koefisien VFI adalah seberapa besar Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh daerah tersebut. Jika daerah mampu untuk mengoptimalkan belanjanya, dengan kata lain mengurangi belanja tanpa mengurangi capaian dalam pelayanan publik maka nilai VFI akan mengalami peningkatan.

Dugaan awal terkait hubungan variabel *vertical fiscal imbalance* ini mengacu pada Jia et al. (2021) yang menyatakan bahwa *vertical fiscal imbalance* berpengaruh negatif terhadap *local taxing power*, artinya semakin tinggi *vertical fiscal imbalance* yang terjadi maka akan semakin rendah upaya pengumpulan pajak daerah maupun retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

### **Growth PDRB per kapita**

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai PDRB per kapita maka semakin besar pula tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Dalam konteks pajak daerah dan retribusi daerah, besaran PDRB per kapita di suatu daerah juga digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam menentukan berapa tarif pajak daerah atau tarif retribusi daerah yang akan dikenakan kepada wajib pajak.

Dugaan awal hubungan variabel *growth PDRB per kapita* terhadap *Local Taxing Power* ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Ishida (2011) yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang dicerminkan dari PDRB per kapita maka semakin besar penerimaan pajak daerah yang diperoleh.

### **Inflasi**

BPS mendefinisikan inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Sama halnya dengan PDRB per kapita, pemerintah daerah juga perlu untuk memperhitungkan inflasi sebagai dasar kebijakan dalam menentukan tarif pajak daerah/retribusi daerah dan menghitung potensi pajak daerah/retribusi daerah yang akan diperoleh pada tahun bersangkutan.

Menurut Lumy et al. (2021), inflasi dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pajak daerah bergantung pada tinggi rendahnya inflasi yang terjadi. Apabila tingkat inflasi rendah, akan menjadi insentif bagi sektor produksi untuk meningkatkan supply barang dan jasa sehingga mendorong perekonomian ke level yang lebih tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah. Dalam hal tingkat inflasi yang tinggi atau tak

terkendali, maka akan menyebabkan perekonomian menjadi lesu dan terjadi ketidakpastian, yang akhirnya terjadi penurunan dalam penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.

Mengingat observasi yang dipakai dalam penelitian ini mencakup semua populasi maka dugaan awal terkait hubungan inflasi dan *local taxing power* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Jia et al. 2021) yang menemukan bahwa inflasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah.

### **Rasio Surplus (Defisit) APBD terhadap PDRB Riil Tahun Sebelumnya**

Dalam proses penyusunan APBD, posisi surplus maupun defisit APBD merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian kepala daerah maupun DPRD. Secara politis, surplus maupun defisit mencerminkan ketidakcermatan pihak eksekutif dalam menyusun dan mengeksekusi anggaran. Dalam konteks penganggaran pajak daerah, diharapkan bahwa deviasi antara anggaran dan realisasi tidak terlalu besar.

Secara empiris, kondisi surplus penerimaan pajak daerah/retribusi daerah pada tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar pengambil kebijakan untuk cenderung menurunkan potensi penerimaan pajak daerah/retribusi daerah di tahun berikutnya. Sebaliknya, ketika terjadi defisit penerimaan pajak daerah/retribusi daerah pada tahun sebelumnya maka pemerintah daerah cenderung untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah/retribusi daerah di tahun berikutnya. (Lee & Kwak, 2020)

### **ln Kepadatan Penduduk**

Tingkat kepadatan penduduk di level kabupaten lebih rendah dibandingkan level perkotaan. Tingkat kepadatan penduduk merupakan cerminan besarnya potensi basis pajak daerah/retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pajak daerah maupun retribusi daerah cenderung bias perkotaan. Meskipun terdapat kesamaan jenis pajak daerah/retribusi daerah yang dapat dipungut, namun penerimaan dari pajak daerah/retribusi daerah cenderung lebih besar diperoleh oleh daerah perkotaan.

Semakin padat penduduk di suatu wilayah maka semakin besar tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik. Agar dapat membiayai layanan publik dengan optimal maka diperlukan usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang salah satunya diperoleh melalui pajak daerah/retribusi daerah. Dugaan awal terkait variabel kepadatan penduduk ini yakni terdapat hubungan yang positif antara variabel kepadatan penduduk dengan *local taxing power*, artinya semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin besar *local taxing power* di suatu daerah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Jia et al. (2021) yakni melalui regresi *fixed effect* data panel. Adapun model ekonometrika yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana hubungan antara *vertical fiscal imbalance* dan *local taxing power* adalah sebagai berikut:

$$LocalTaxingPower_{it} = \alpha + \beta VFI_{it} + \gamma X_{it} + \vartheta_i + \varepsilon_{it}$$

dimana,

$i$  = unit analisis (*cross section*) dalam hal ini adalah Kabupaten atau Kota

$t$  = periode waktu penelitian (*time series*), yakni dari tahun 2011 s.d. 2020

*LocalTaxingPower* = variabel dependen dalam penelitian

$\alpha$  = *Intercept*

$\beta$  = Parameter koefisien/*slope* dari *VFI*

*VFI* = *Vertical Fiscal Imbalance*, yang merupakan variabel *interest* penelitian

$\gamma$  = Parameter koefisien/*slope* dari  $X$

$X$  = Vektor dari variabel kontrol (*independen*), yang terdiri dari:

- *Growth* PDRB per kapita,
- Inflasi (PDRB *Deflator*),
- Rasio Surplus (Defisit) terhadap PDRB Riil Tahun Sebelumnya, dan

–  $\ln$  Kepadatan Penduduk

$\vartheta$  = *Unobserved error*

$\varepsilon$  = *Time-varying idiosyncratic error*

Regresi akan dilakukan pada masing – masing kabupaten dan kota berdasarkan status Daerah Induk atau Daerah Otonom Baru, sehingga terdapat 4 (empat) model regresi yang akan disajikan.

Penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia sebagai unit analisis, sehingga selanjutnya digunakan model Fixed Effect tanpa melakukan *Hausman test* untuk melihat apakah metode *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan. Hal ini sesuai dengan Wooldridge (2010) yang menjelaskan bahwa pada populasi yang besar khususnya dengan unit observasi mencakup wilayah geografis yang luas (seperti negara atau provinsi), metode *Fixed Effect* lebih tepat digunakan daripada *Random Effect*. Metode *Fixed Effect* hampir selalu jauh lebih meyakinkan daripada *Random Effect* untuk analisis yang menggunakan data agregat.

Efek waktu (*time effect*) ditambahkan dalam persamaan regresi data panel untuk memperhitungkan efek dari waktu ke waktu karena perubahan yang terjadi seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan pajak daerah/retribusi daerah, perubahan kepemimpinan kepala daerah, perubahan tarif pajak daerah/retribusi daerah, ataupun diskresi kebijakan terkait pemungutan pajak daerah/retribusi daerah (Baltagi, 2021). Sebagai tambahan, akan disertakan interaksi antara pulau utama yang ada di Indonesia dan efek waktu (*time effect*) untuk mengontrol perubahan yang bersifat spasial. Klasifikasi pulau yang digunakan pada model terdiri atas 8 pulau, yakni Pulau Jawa (sebagai baseline), Pulau Sumatera, Pulau Bali, wilayah pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, wilayah pulau Maluku, dan Pulau Papua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil regresi dapat diinterpretasikan bahwa perubahan variabel *interest* yakni *vertical fiscal imbalance* berpengaruh negatif terhadap *local taxing power* untuk semua kabupaten/kota baik di daerah induk maupun daerah otonom baru, namun dengan *magnitude* dan tingkat signifikansi yang berbeda – beda. Hubungan negatif *vertical fiscal imbalance* terhadap *local taxing power* ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jia et al. (2021).

Mengingat koefisien *vertical fiscal imbalance* berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1 maka perlu dilakukan penyesuaian untuk menginterpretasikan hasil regresi. Koefisien VFI pada hasil regresi akan dibagi dengan 100 sehingga hasil regresi yang spesifik menampilkan hubungan *vertical fiscal imbalance* dan *local taxing power* akan dibagi pula dengan 100.

### 1. Perbandingan *Vertical Fiscal Imbalance* antara Kabupaten dan Kota pada Daerah Induk

Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel *vertical fiscal imbalance* pada Kabupaten dan Kota di Daerah Induk berpengaruh negatif (*ceteris paribus*) dan signifikan secara statistik pada tingkat 1% namun dengan *magnitude* yang berbeda. Level kabupaten menunjukkan bahwa peningkatan nilai *vertical fiscal imbalance* sebesar 0,01 yang artinya penurunan tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat, menyebabkan meningkatnya *local taxing power* sebesar 0,042% sementara pada level kota adalah sebesar 0,015%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh berkurangnya *vertical fiscal imbalance* terhadap *local taxing power* pada level kabupaten dampaknya 2,7 kali lebih besar dibandingkan level kota.

### 2. Perbandingan *Vertical Fiscal Imbalance* antara Kabupaten dan Kota pada Daerah Otonom Baru

Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel *vertical fiscal imbalance* pada Kabupaten dan Kota di Daerah Otonom Baru sama – sama berpengaruh negatif (*ceteris paribus*) dan signifikan secara statistik pada tingkat 1%. Level kabupaten menunjukkan bahwa peningkatan nilai *vertical fiscal imbalance* sebesar 0,01 atau penurunan tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat

sebesar 0,01 menyebabkan meningkatnya *local taxing power* sebesar 0,06% sementara pada level kota adalah sebesar 0,027%.

### 3. Perbandingan Vertical Fiscal Imbalance antara Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Kabupaten/Kota pada Daerah Otonom Baru

Variabel *vertical fiscal imbalance* pada level kabupaten/kota di daerah induk maupun daerah otonom baru sama – sama signifikan secara statistik mempengaruhi *local taxing power* pada tingkat 1%. Namun secara *magnitude* lebih besar pada level kabupaten/kota di daerah otonom baru. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika *vertical fiscal imbalance* mengalami penurunan, terdapat ruang yang lebih besar bagi kabupaten maupun kota di daerah otonom baru untuk meningkatkan *local taxing power*-nya dibandingkan kabupaten maupun kota pada daerah induk. Dapat disimpulkan bahwa ketika ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang, baik kabupaten maupun kota di daerah otonom baru cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di daerah induk.

### 4. Variabel kontrol lainnya

Variabel *growth* PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap *local taxing power*, namun hanya signifikan secara statistik untuk kota yang ada di daerah induk dan kabupaten yang ada di daerah otonom baru. Secara *magnitude*, level kota di daerah induk sedikit lebih besar dibandingkan dengan kabupaten di daerah otonom baru. Dimana kenaikan 1% *growth* PDRB per kapita pada kota di daerah induk akan meningkatkan *local taxing power* sebesar 0,0056% atau hanya 0,002% lebih besar dibandingkan level kabupaten di daerah otonom baru. Arah hubungan terkait variabel *growth* PDRB per kapita ini sejalan dengan dugaan awal yang mengacu pada hasil penelitian Ishida (2011).

Terkait variabel inflasi, meskipun semua hasil menunjukkan tidak signifikan, namun memberikan arah hubungan yang berbeda. Pada level kabupaten/kota di daerah induk, inflasi berpengaruh negatif terhadap *local taxing power*, arah hubungan yang negatif ini sejalan dengan hasil penelitian Jia et al. (2021). Sementara pada level kabupaten/kota di daerah otonom baru menunjukkan arah yang berlawanan yakni berhubungan positif.

Koefisien pada variabel rasio surplus/defisit terhadap PDRB Tahun Anggaran sebelumnya menunjukkan tanda (-), sesuai dengan tanda yang diharapkan untuk merepresentasikan dominannya defisit APBD pada pemerintah kabupaten/kota. Lee & Kwak (2020) menyatakan bahwa ketika terjadi defisit penerimaan pajak daerah/retribusi daerah pada tahun sebelumnya maka pemerintah daerah cenderung untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah/retribusi daerah di tahun berikutnya. Hal ini yang terjadi di level kabupaten/kota, baik di daerah induk maupun daerah otonom baru. Namun semuanya tidak memberikan hasil yang signifikan secara statistik.

Variabel kontrol yang terakhir, yakni *ln* Kepadatan Penduduk memberikan hasil yang menarik untuk dicermati. Meskipun tidak signifikan secara statistik, pada level kabupaten di daerah induk dan kota di daerah otonom baru menunjukkan terdapat hubungan yang negatif terhadap *local taxing power*. Jika diasumsikan terjadi peningkatan kepadatan penduduk (*ceteris paribus*), namun yang terjadi adalah penurunan *local taxing power*, maka dapat diindikasikan terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah atau tidak optimalnya aparat pajak daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak daerah tersebut. Untuk level kabupaten di daerah otonom baru menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik pada level 5%.

**Tabel 1.**  
**Hasil Regresi *Fixed Effect***

	<i>Local Taxing Power</i>			
	Daerah Induk		Daerah Otonom Baru	
	Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota
<i>Vertical Fiscal Imbalance</i>	4,1636*** (0,4154)	1,5188*** (0,1888)	5,9845*** (0,2776)	2,6807*** (0,7816)
Growth PDRB per kapita	0,0027 (0,0019)	0,0056*** (0,0017)	0,0032* (0,0018)	-0,0001 (0,0071)
Inflasi (PDRB Deflator)	-0,0026 (0,0021)	-0,0040 (0,0032)	0,0003 (0,0034)	0,0039 (0,0183)
Surplus/Defisit Tahun Anggaran sebelumnya	-0,4774 (0,4710)	-0,2342 (1,1656)	0,0199 (0,1150)	-0,1122 (1,4824)
<i>ln</i> Kepadatan Penduduk	-0,0908 (0,0637)	0,8121 (0,1939)	0,3450** (0,1623)	-1,0644 (0,7394)
<i>Intercept</i>	0,4379 (0,3174)	-6,1014*** (1,5250)	-1,2971** (0,5905)	7,3052 (4,8855)
Kabupaten/Kota <i>Fixed Effect</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Tahun <i>Fixed Effect</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Pulau × Tahun <i>Fixed Effect</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
<i>Number of Groups</i>	268	68	147	25
<i>Number of Observations</i>	2.680	680	1.380	250
Prob > F	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>R</i> <sup>2</sup>	0,9077	0,8982	0,7408	0,7602
Adjusted <i>R</i> <sup>2</sup>	0,8941	0,8708	0,6932	0,6403

Keterangan : *Robust standard error* ditunjukkan di dalam kurung

\*\*\* Signifikan pada taraf 1%, \*\* Signifikan pada taraf 5%, \* Signifikan pada taraf 1%

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini merupakan studi empiris yang mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan dan berapa besar *magnitude* dari perubahan *vertical fiscal imbalance* terhadap *local taxing power* di kabupaten/kota di Indonesia, baik yang merupakan daerah induk ataupun daerah otonom baru. Metode estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Hasil yang diperoleh dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dengan membandingkan antara kabupaten dan kota pada daerah induk diperoleh hasil bahwa variabel *interest* penelitian, yakni *vertical fiscal imbalance* berpengaruh negatif (*ceteris paribus*) dan signifikan secara statistik pada tingkat 1% namun dengan *magnitude* yang berbeda. Level kabupaten menunjukkan bahwa peningkatan nilai *vertical fiscal imbalance* sebesar 0,01 yang artinya penurunan tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat, menyebabkan meningkatnya *local taxing power* sebesar 0,042% sementara pada level kota adalah sebesar 0,015%. Pengaruh *vertical fiscal imbalance* terhadap *local taxing power* pada level kabupaten berdampak 2,7 kali lebih besar dibandingkan level kota.
- 2) Dengan membandingkan antara kabupaten dan kota pada daerah otonom baru diperoleh hasil bahwa variabel *interest* penelitian, yakni *vertical fiscal imbalance* berpengaruh negatif (*ceteris paribus*) dan signifikan secara statistik pada tingkat 1%. Level kabupaten menunjukkan bahwa peningkatan nilai *vertical fiscal imbalance* sebesar 0,01 atau penurunan tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat sebesar 0,01 menyebabkan meningkatnya *local taxing power* sebesar 0,06% sementara pada level kota adalah sebesar 0,027%
- 3) Dengan membandingkan antara kabupaten/kota pada daerah induk dan kabupaten/kota

pada daerah otonom baru, diperoleh hasil bahwa variabel *interest* penelitian, yakni *vertical fiscal imbalance* berpengaruh negatif (*ceteris paribus*) dan signifikan secara statistik pada tingkat 1%. Namun secara *magnitude* lebih besar pada level kabupaten/kota di daerah otonom baru. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika *vertical fiscal imbalance* mengalami penurunan, terdapat ruang yang lebih besar bagi kabupaten maupun kota di daerah otonom baru untuk meningkatkan *local taxing power*-nya dibandingkan kabupaten maupun kota pada daerah induk. Dapat disimpulkan bahwa ketika ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang, baik kabupaten maupun kota di daerah otonom baru cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di daerah induk.

- 4) Dengan membandingkan hasil regresi pada penelitian ini dan yang telah dilakukan oleh Jia et al. (2021) pada konteks di negara Cina, diperoleh hasil bahwa elastisitas *vertical fiscal imbalance* terhadap *local taxing power* di Indonesia lebih rendah dibandingkan Cina, dimana pada negara tersebut berkurangnya ketergantungan terhadap transfer pusat sebesar 1% akan meningkatkan *local taxing power* sebesar 0,071%.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang berdampak pada kurang optimalnya hasil penelitian seperti yang diharapkan. Keterbatasan tersebut antara lain :

- 1) Penelitian ini belum mengontrol kemungkinan adanya *reverse causality* yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen, khususnya antara variabel *vertical fiscal imbalance* dengan *local taxing power*. Kondisi ini tidak dapat dihindari mengingat salah satu komponen dalam menghitung variabel *vertical fiscal imbalance* yakni Dana Alokasi Umum (sebagai bagian Dana Perimbangan) yang diterima tiap daerah juga turut memperhitungkan berapa besar pendapatan asli daerah yang mampu diperoleh masing – masing daerah. Sementara itu pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen dalam variabel *local taxing power* merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Dalam hal ini jika pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, maka secara langsung akan mengurangi Dana Alokasi Umum yang diperoleh daerah, sehingga akan menyebabkan *negative bias* atau besaran koefisien regresi akan *understated*.
- 2) Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan panel data yang bersifat statis. Terdapat kemungkinan bahwa *local taxing power* sebagai variabel dependen juga dipengaruhi oleh kondisi pada tahun sebelumnya, sehingga penggunaan metode panel data dinamis pada penelitian selanjutnya layak untuk dipertimbangkan.

## Saran

Hasil penelitian ini setidaknya membuktikan bahwa meskipun elastisitas *vertical fiscal imbalance* terhadap *local taxing power* relatif rendah secara ekonomi namun memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, selain tetap mengupayakan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah lebih besar daripada pertumbuhan PDRB, perlu juga dilakukan berbagai upaya baik dari sisi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menurunkan *vertical fiscal imbalance* (semakin mendekati 1 maka semakin rendah *vertical fiscal imbalance*) di level kabupaten dan kota. Dari sisi pemerintah pusat perlu dipertimbangkan untuk secara bertahap dan proporsional mengurangi transfer ke daerah, sementara di sisi pemerintah daerah agar lebih optimal dalam melakukan belanja daerah. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang diperlukan untuk menyeimbangkan antara desentralisasi sisi pengeluaran dengan desentralisasi sisi penerimaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Age Wibisono, Dea, dan Siti Aisyah. 2020. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014-2016."
- Baltagi, Badi H. 2021. *Econometric Analysis of Panel Data*. Cham: Springer International Publishing. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-53953-5>.
- Bappenas, dan UNDP. 2008. Jakarta: UNDP *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, 2001 - 2007*. Jakarta: BRIDGE.
- Benos, Nikos. 2009. "Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from EU

- Countries.”
- Boadway, Robin, dan Sean Dougherty. 2018. “Decentralisation in a Globalised World: Consequences and Opportunities.” *OECD Working Paper on Fiscal Federalism* 21.
- Chang, Feiyang. 2017. “Local Tax Scale and Its Economic Effects in China.” *Modern Economy* 8(3): 445–57.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 2011. *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011*.
- Ishida, Kazuyuki. 2011. “The Growth and Stability of the Local Tax Revenue in Japan.” *Public Budgeting & Finance* 31(1): 56–75.
- Jaweng, Robert Na Endi. 2022. *Empat Wajah Desentralisasi - Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
- Jia, Junxue, Qingwang Guo, dan Jing Zhang. 2014. “Fiscal Decentralization and Local Expenditure Policy in China.” *China Economic Review* 28: 107–22.
- Jia, Junxue, Yongzheng Liu, Jorge Martinez-Vazquez, dan Kewei Zhang. 2021. “Vertical Fiscal Imbalance and Local Fiscal Indiscipline: Empirical Evidence from China.” *European Journal of Political Economy* 68: 101992.
- Khoirunurrofik, Khoirunurrofik. 2020. “Dampak COVID-19 Bagi Perekonomian Dan Fiskal Daerah.” In *Pajak Daerah Di Indonesia Pasca Pandemi*, Jakarta: LPEM FEB UI.
- Konferensi Internasional Desentralisasi Fiskal di Indonesia Satu Dekade Setelah Ledakan Besar (2011 : Jakarta, Indonesia). 2011. *Desentralisasi Fiskal Di Indonesia : Satu Dekade Setelah Ledakan Besar / Penyunting Dan Penyelenggara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan*. ed. Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- Kuncoro, Haryo. 2004. “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia.” *Economic Journal of Emerging Markets* 9(1).
- Lee, Tae-Ho, dan Sunjoo Kwak. 2020. “Revenue Volatility and Forecast Errors: Evidence from Korean Local Governments.” *Local Government Studies* 46(6): 979–94.
- Lewis, Blane D. 2018. “Local Government Form in Indonesia: Tax, Expenditure, and Efficiency Effects.” *Studies in Comparative International Development* 53(1): 25–46.
- Lewis, Blane D. 2017. “Does Local Government Proliferation Improve Public Service Delivery? Evidence from Indonesia .” *Journal of urban affairs* 39(8): 1047–65.
- . 2019. “Legislature Size, Local Government Expenditure and Taxation, and Public Service Access in Indonesia .” *Studies in comparative international development* 54(2): 274–98.
- Loganathan, Nanthakumar et al. 2017. “Tax Reform, Inflation, Financial Development and Economic Growth in Malaysia.” *ESPERA* 20(4).
- Lumy, Denny George, Paulus Kindangen, dan Daisy S M Engka. 2021. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(2): 1–16.
- Mahi, Benedictus Raksaka, dan Syarah Siti Supriyanti. 2019. “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 19(1): 118–38.
- Martínez-Vázquez, Jorge, Santiago Lago-Peñas, dan Agnese Sacchi. 2017. “The Impact of Fiscal Decentralization: A Survey.” *Journal of Economic Surveys* 31(4): 1095–1129.
- Nikijuluw, Ruth. 2012. “Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 12(2): 168–91.
- Oates, Wallace E. 1999. “An Essay on Fiscal Federalism.” *Journal of economic literature* 37(3): 1120–49.
- Pambudhi, P. Agung. 2021. *Janji Otonomi Daerah - Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
- Prasojo, Eko. 2011. “Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi Politik.” *Spirit Publik* 1(7).
- Saragih, Arfah Habib. 2018. “Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Sikap* 3(1).
- Savitri, NMYS, dan Anak Agung Gede Suarjaya. 2020. “Effect of Local Taxes, Regional Levies and General Allocation Funds (DAU) on the Economic Growth of Local Governments in Bali

- Province.” *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 4(3): 379–86.
- Serrato, Juan Carlos Suárez, dan Owen Zidar. 2018. “The Structure of State Corporate Taxation and Its Impact on State Tax Revenues and Economic Activity.” *Journal of Public Economics* 167: 158–76.
- Shah, Anwar, Zia Qureshi, Brian Binder, dan Heng-fu Zou. 1994. “Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia.” *World Bank Discussion Paper* 239.
- Wooldridge, Jeffrey M. 2010. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT press.